

Formulir Check List Pemberkasan

Kode Klasifikasi :

HM.04

Kegiatan : Pemutakhiran DIP-DIK

Tanggal Kegiatan : 7 Februari 2024

| No Berkas | No Item Arsip | Uraian Informasi Arsip | No Surat | Tanggal |
|-----------|---------------|--|---------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 67 | 1 | Surat Pemberitahuan Pemutakhiran DIP-DIK, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (76) | B/163/HM.04/02/2024 | 7 Februari 2024 |

Mengetahui
Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama,

Endah Sri Lestari, SH, M.Si

16.02.24

Administrasi Inspektorat



76
15-2-24

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : B/163/HM.04/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Hal
Perihal : Surat Pemberitahuan Pemutakhiran DIP-DIK

Jakarta, 7 Februari 2024

Yth.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
(sesuai Keputusan Sekjen No. 2257/SEKJEN/2022 tentang Penetapan PPID)
Jakarta

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diperlukan melakukan pemutakhiran Daftar informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) secara berkala. Oleh karena itu kami meminta perkenaan Saudara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Setjen DPR RI untuk dapat:

1. Menunjuk dan mengirimkan nama dan nomor kontak personil sebagai PIC dalam Pemutakhiran DIP-DIK tahun 2024 di unit kerja Saudara paling lambat tanggal 16 Februari 2024 (jika ada perubahan personil)._Daftar personil tahun 2023 dapat dilihat melalui link berikut: https://bit.ly/LIST_PICPENDAMPING
2. Menyiapkan Daftar Usulan DIP (wajib ada) dan DIK (jika ada) yang sudah ditandatangani pengusul (PPID Pelaksana) dan disetujui atasan (Pejabat Tinggi Pratama) sebagaimana contoh dalam Petunjuk Teknis dan Modul (https://bit.ly/MODUL_DIPDIK).
3. Dokumen *sofffile* DIP dan DIK (jika ada) yang sudah disetujui agar diunggah melalui *link* berikut (DIP: <https://bit.ly/PPIDDPDIP2024>, DIK: <https://bit.ly/PPIDDPDIK2024>). Adapun dokumen *hardcopy* harap dikirimkan ke PPID paling lambat tanggal 1 Maret 2024.
4. Kegiatan pendampingan (*coaching clinic*) akan diberitahukan lebih lanjut. Adapun petugas pendamping penyusunan DIP-DIK sebagaimana terlampir.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi perhatian bersama demi terciptanya pengelolaan layanan informasi yang optimal pada Badan Publik Setjen DPR RI. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Catatan: Link menggunakan akun Microsoft

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi,



Drs. Suratna, M.Si

TEMBUSAN

1. Sekretaris Jenderal
2. Deputy Bidang Administrasi
3. Deputy Bidang Persidangan
4. Kepala Badan Keahlian Dewan
5. Inspektur Utama
6. Kepala Biro Hukum & Pengaduan Masyarakat
7. Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional
8. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
9. Kepala Biro Keuangan
10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
11. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
12. Kepala Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma
13. Kepala Biro Persidangan I
14. Kepala Biro Persidangan II
15. Kepala Biro SDM
16. Kepala Biro Umum
17. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
18. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
19. Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
20. Kepala Pusat Analisis Keparlemenan;
21. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU
22. Kepala Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif;
23. Kepala Pusat Teknologi Informasi
24. Inspektur I
25. Inspektur II

Lampiran Surat

Nomor : 163/HM.04/02/2024

Tanggal : 7 Februari 2024

DAFTAR PPID PELAKSANA

(sesuai Keputusan Sekjen No. 2257/SEKJEN/2022 tentang Penetapan PPID)

1. Kepala Bagian Sekretariat Komisi I;
2. Kepala Bagian Sekretariat Komisi II;
3. Kepala Bagian Sekretariat Komisi III;
4. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV;
5. Kepala Bagian Sekretariat Komisi V;
6. Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI;
7. Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII;
8. Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII;
9. Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX;
10. Kepala Bagian Sekretariat Komisi X;
11. Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI
12. Kepala Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna;
13. Kepala Bagian Risalah;
14. Kepala Bagian Set. Badan Legislasi;
15. Kepala Bagian Set. Badan Anggaran
16. Kepala Bagian Set Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
17. Kepala Bagian Set Mahkamah Kehormatan Dewan;
18. Kepala Bagian Set. Badan Urusan Rumah Tangga;
19. Kepala Bagian Set. Panitia Khusus;
20. Kepala Bagian Set. Ketua
21. Kepala Bagian Set. Wakil Ketua Bid Politik dan Keamanan;
22. Kepala Bagian Set. Wakil Ketua Bid Industri dan Pembangunan;
23. Kepala Bagian Set. Wakil Ketua Bid Ekonomi dan Keuangan;
24. Kepala Bagian Set. Wakil Ketua Bid Kesejahteraan Rakyat;
25. Kepala Bagian Set. Badan Musyawarah
26. Kepala Bagian Set. Musyawarah Pimpinan
27. Kepala Bagian Set. TU Pimpinan Sekretariat Jenderal;
28. Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi;
29. Kepala Bagian Set. Kerjasama Organisasi Internasional;
30. Kepala Bagian Set. Kerjasama Organisasi Regional;
31. Kepala Bagian Set. Kerjasama Bilateral dan Admnistrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota;
32. Kepala Bagian Alih Bahasa;
33. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
34. Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen;
35. Kepala Bagian Penerbitan;
36. Kepala Bagian Protokol;
37. Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum;
38. Kepala Bagian Arsip;
39. Kepala Bagian Perpustakaan;
40. Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum;
41. Kepala Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum;
42. Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat;

43. Kepala Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN;
44. Kepala Bagian Manajemen Kerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara;
45. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara;
46. Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional;
47. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
48. Kepala Bagian Perencanaan;
49. Kepala Bagian Pengelola Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
50. Kepala Bagian Administrasi Keuangan;
51. Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara;
52. Kepala Bagian Perjalanan;
53. Kepala Bagian Gedung dan Instalasi;
54. Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan;
55. Kepala Bagian Pengelolaan Wisma DPR RI;
56. Kepala Bagian Pengamanan Dalam;
57. Kepala Bagian Perlengkapan dan Kendaraan;
58. Kepala Bagian Layanan Kesehatan;
59. Kepala Bagian Administrasi Badan Keahlian;
60. Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Utama;
61. Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional;
62. Kepala Bidang Pelatihan Teknis;
63. Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi;
64. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
65. Kasubbag TU Pusat Teknologi Informasi;
66. Kasubbag TU Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif;
67. Kasubbag TU Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;
68. Kasubbag TU Pusat Perancangan Undang-Undang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
69. Kasubbag TU Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara;
70. Kasubbag TU Pusat Analisis Keparlemenan;
71. Kasubbag TU Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.